



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja masing-masing;
 - b. bahwa untuk pencapaian tujuan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisiner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan KPU Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran

strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kinerja dan Anggaran;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Fadhil Nur Hilaluddin

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya dokumen pelaksanaan fasilitasi KPU Luwu Utara dalam hal kehumasan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas</i>	Laporan Bakohumas pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Luwu Utara atas rencana kerja yang telah ditetapkan	<i>Jumlah total revisi</i>	Data Revisi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secaraakuntabel dan tepat waktu oleh KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah laporan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total laporan monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$	Data SAKIP pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase target kinerja KPU Luwu Utara yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) untuk melihat tingkat pencapaian target kinerja KPU Luwu Utara yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	$\frac{\text{Jumlah target kinerja yang tercapai}}{\text{Jumlah total target kinerja}} \times 100\%$	Data Laporan Kinerja pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) untuk melihat kemampuan KPU Luwu Utara dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	<i>Nilai LKE Reformasi Birokrasi</i>	LKE Reformasi Birokrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian tepat waktu}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Data pendukung pemberian ijin, cuti, kenaikan pangkat pegawai pada Sub Bagian Hukum dan SDM
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keefektifan penegakan disiplin pegawai	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang disiplin}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Dokumen penegakan kedisiplinan pada Sub Bagian Hukum dan SDM
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{Jumlah database pegawai yang tercatat akurat dalam database kepegawaian}}{\text{Jumlah total database pegawai}} \times 100\%$	Database kepegawaian pada Aplikasi SiASN pada Sub Bagian Hukum dan SDM
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah dokumen pengukuran kinerja pegawai KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah dokumen pengukuran kinerja pegawai}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Dokumen laporan kinerja pegawai (SKP) pada Sub Bagian Hukum dan SDM
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah pegawai KPU Luwu Utara yang mendapatkan layanan kesejahteraan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Data pendukung tunjangan kinerja pegawai pada Sub Bagian Hukum dan SDM, dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah total laporan pertanggungjawaban}} \times 100\%$	LPJ Keuangan berupa BKU dan Buku Pembantu pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Jumlah Laporan pertanggungjawaban Keuangan sesuai ketentuan oleh KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah total laporan pertanggungjawaban}} \times 100\%$	Laporan keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan sistem akuntansi yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan secara tepat waktu oleh KPU Luwu Utara	<i>Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu</i>	Laporan keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan secara tepat waktu oleh KPU Luwu Utara	<i>Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu</i>	Laporan keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Luwu Utara	<i>Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid</i>	Laporan realisasi anggaran pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Luwu Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Luwu Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{\text{Jumlah barang milik negara yang dapat dikelola}}{\text{Jumlah total barang milik negara}} \times 100\%$	Dokumen BMN (BAR Internal, CAL BMN, Laporan Wasdal dan RKBMN dan laporan kondisi barang) pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah dokumen kearsipan KPU Luwu Utara yang telah disusun	Pengukuran dalam satuan nominal dari jumlah dokumen kearsipan KPU Luwu Utara yang telah disusun	<i>Jumlah total dokumen kearsipan KPU Luwu Utara yang telah disusun</i>	Dokumen kearsipan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan persentase pada satuan waktu tertentu untuk melihat banyaknya arsip yang dikelola KPU Luwu Utara sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	$\frac{\text{Jumlah arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip}}{\text{Jumlah total Arsip}} \times 100\%$	Dokumen kearsipan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Luwu Utara yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker	$\frac{\text{Jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total sarana transportasi}} \times 100\%$	Data kondisi kendaraan dinas pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Luwu Utara yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Luwu utara yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker}} \times 100\%$	Data kondisi fasilitas perkantoran pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Luwu Utara yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya gedung dan gudang milik KPU Luwu Utara yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah gedung dan gudang KPU Luwu Utara yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah gedung dan gudang KPU Luwu Utara}} \times 100\%$	Dokumen pemeliharaan gedung dan gudang pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/ Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesiapan KPU Luwu Utara menyelesaikan Hasil Notulensi/ Dokumentasi/ Rapat Pleno rutin paling lambat 2 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah hasil notulensi dan dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja}}{\text{Jumlah total hasil rapat pleno rutin}} \times 100\%$	Laporan Pleno Rutin pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Luwu Utara yang dapat ditanggulangi	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Luwu Utara dalam menanggulangi gangguan keamanan di wilayah atau lingkungan satker	$\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi}}{\text{Jumlah total gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Luwu Utara}} \times 100\%$	Laporan Jagat Saksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Laporan pengaduan masyarakat pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP}} \times 100\%$	Laporan tindaklanjut rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Luwu Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat kedisiplinan dan ketaatan KPU Luwu Utara dalam mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total kartu kendali SPIP}} \times 100\%$	Laporan SPIP pada Sub Bagian Hukum dan SDM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase penilaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Luwu Utara dalam skala minimal "Baik"	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Luwu Utara yang didapat dari Inspektorat	<i>Nilai SAKIP KPU Luwu Utara yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja</i>	LKE SAKIP pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
6	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM minimal 50%	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Dokumen sertifikat pegawai pada Sub Bagian Hukum dan SDM
7	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	$\frac{\text{Jumlah keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total keputusan KPU Luwu Utara}} \times 100\%$	Dokumen Surat Keputusan pada Sub Bagian Hukum dan SDM
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Luwu Utara sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah pengelolaan dan pendokumentasian sesuai peraturan pereundang – undangan}}{\text{Jumlah total produk hukum}} \times 100\%$	Laporan Pengelolaan JDIH pada Sub Bagian Hukum dan SDM
8	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase tindak lanjut terhadap pengusulan PAW anggota DPRD Luwu Utara yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesiapan dan kemampuan KPU Luwu Utara dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Kabupaten Luwu Utara dalam waktu 5 hari kerja	$\frac{\text{Proses PAW Anggota DPRD Luwu Utara yang dapat selesai dalam 5 hari kerja}}{\text{Jumlah total proses PAW Anggota DPRD Luwu Utara}} \times 100\%$	Laporan pelaksanaan PAW pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
9	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah Laporan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan Digitalisasi RPP	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Laporan Rumah Pintar Pemilu milik KPU Luwu Utara yang telah dilengkapi digitalisasi RPP	<i>Jumlah Laporan Rumah Pintar Pemilu milik KPU Luwu Utara yang telah dilengkapi digitalisasi RPP</i>	Laporan digitalisasi RPP pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya permohonan informasi yang ditindaklanjuti PPID sesuai dengan SOP	$\frac{\text{Jumlah tindaklanjut permohonan informasi melalui PPID sesuai dengan SOP}}{\text{Jumlah total permohonan informasi melalui PPID}} \times 100\%$	Laporan PPID pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Luwu Utara serta media massa.	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya informasi dan publikasi non tahapan dan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau medsos KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah informasi dan publikasi tahapan pemilihan dan tahapan non pemilihan yang dimuat di laman atau medsos}}{\text{Jumlah total tahapan pemilihan dan tahapan non pemilihan}} \times 100\%$	Laporan Bakohumas pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
10	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Luwu Utara dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah logistik Pemilu dan Pemilihan yang diinventarisir dan dipelihara 1 hari sebelum pemungutan suara}}{\text{Jumlah total logistik Pemilu dan Pemilihan}} \times 100\%$	Laporan pemeliharaan logistik pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Luwu Utara dalam penyediaan Laporan dan Dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah laporan dan dokumentasi logistik Pemilu dan Pemilihan}}{\text{Jumlah total Pemilu dan Pemilihan}} \times 100\%$	Laporan dan Dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
11	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Luwu Utara dalam memutakhirkan data pemilih secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih}}{\text{Jumlah total Pemilu dan Pemilihan}} \times 100\%$	Dokumen pemutakhiran data pemilih pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana TI untuk sistem informasi yang handal, aman dan lancar}}{\text{Jumlah total sarana dan prasarana TI untuk sistem informasi}} \times 100\%$	Dokumentasi sarana dan prasarana TI pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat penerapan seluruh Aplikasi oleh KPU Luwu Utara secara terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah aplikasi terintegrasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah seluruh aplikasi terintegrasi}} \times 100\%$	Dokumentasi penerapan aplikasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

MASAMBA, 20 JANUARI 2025
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum



Fadhah Nur Hilaluddin